

■ Penyidikan Korupsi Bansos Jateng Lambat

Kejati Bantah Ada Titipan

SEMARANG - Penanganan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintahan Jateng tahun 2010/ 2011 dengan tiga tersangka mantan dan pejabat di Pemprov Jateng tampak lambat. Tiga tersangka sendiri yakni Mohamad Yusuf, mantan Kepala Biro Bina Sosial, Joko Mardiyanto, mantan Kepala Biro Bina Mental (kini staf ahli gubernur) dan Joko Suyanto, mantan Ketua Tim Verifikasi proposal juga tak ditahan.

Penyidik Kejati Jateng yang menangani kasusnya, menyatakan masih menyidik dan memeriksa saksi-saksi. Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidus) Kejati Jateng, Masyhudi membantah menghentikan penyidikan kasusnya.

"Kasus Bansos memang terkesan agak lambat, tapi percaya meski lambat bukan karena apa-apa, tapi karena sulit. Ada kasus yang penyidikannya tak lama," kata Masyhudi, kemarin.

Masyhudi menyatakan, tidak ada titipan dan kepentingan politik apapun terkait penyidikan kasus ketiga tersang-

ka. "Bukannya apa-apa. Tidak ada kepentingan politis atau titipan. Tapi terus tersang saja, kami hati-hati karena menyangkut se-Jateng," lanjutnya.

Disinggung mengenai lambatnya penanganan penyidikan, Masyhudi beralasan, banyaknya saksi-saksi yang harus diperiksa. Ditambah lagi, kata dia, sebagian saksi menolak untuk datang memenuhi panggilan pemeriksaan.

"Saksi jauh-jauh. Bahkan dari kabupaten atau kecamatan bisa 3-4 jam. Kesulitannya, ada penerima yang terima Rp 5-10 juta, tapi dia dipanggil. Terimanya sedikit, mungkin berat

diongkos. Tapi jika perlu akan didatangi. Kami terus mengupayakan penyelesaiannya. Dalam waktu dekat semoga bisa selesai," ujar dia.

■ Tidak Ditahan

Terkait penyidikannya, Masyhudi mengatakan, pihaknya telah mengembangkannya. "Kasus ini sudah dimintakan petunjuk Kajati dan dikembangkan, apa ada penanggung jawab lainnya," kata dia.

Penyidik sendiri hingga kini belum memeriksa dan menahan tersangka. Kejati yang menyidik kasusnya sejak awal Januari 2014 lalu menyatakan, tidak mau buru-buru menahan tiga tersangka.

Sebelumnya pernah diberitakan, penyidikan kasus dugaan korupsi bansos juga terjadi di sejumlah daerah. Penanganannya dibagi-bagi perwilayah kejaksaan. Kasus korupsi diduga terjadi pada pos anggaran bansos pendidikan tahun 2010 dan bansos kemasyarakatan tahun 2011. Anggaran pos bansos pendidikan berasal dari Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng. Sementara, penyidikan kasus bansos kemasyarakatan yang dikeluarkan bina sosial

Pemprov Jateng salah satunya didasarkan pada satu alat bukti investigasi BPKP Jateng.

Modus dugaan penyimpangan dan pola dugaan korupsi yang dilakukan, ditemukan adanya sejumlah titik sampel yang diduga fiktif. Dari sejumlah pos anggaran, ribuan penerima bansos diketahui fiktif.

Beberapa modus pelaku penerima bansos, di antaranya membuat proposal fiktif. Atas proposal bansos yang disetujui, anggaran yang diterima dipotong antara 15-20 persen.

Pada tahun 2011, diduga pos bansos kemasyarakatan memiliki penyimpangan tertinggi. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jateng yang menyatakan ada indikasi penyimpangan dana Rp 26,89 miliar. Dana itu disalurkan tanpa disertai pertanggungjawaban memadai.

Selain tanpa LPJ, alamat penerima bansos diketahui banyak yang diduga fiktif. Bahkan dari 208 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (ormas) yang mendapatkan dana bansos, hanya 5 persen yang terdaftar di Badan Kesbangpolinmas Jateng. ■ *rdi-Yu*